

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang dimanfaatkan untuk menganalisis data melalui cara mendeskripsikan atau mencerminkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi (Sugiyono, 2023:206). Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu mencakup variabel dependen (Y) kinerja keuangan pemerintah, sedangkan variabel independennya yaitu (X1) ukuran pemerintah daerah, (X2) dana perimbangan, dan (X3) belanja modal yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
(X1) UPD	50	27.8606	29.3961	28.418506	.3859115
(X2) DP	50	26.9317	28.2827	27.427282	.2982750
(X3) BM	50	24.6589	27.1133	26.041056	.5071387
(Y) Kinerja Keuangan	50	.0116	.2387	.070438	.0457926
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji relatif deskriptif untuk setiap variabel penelitian sebagai berikut:

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,0116 (1,16%) yang berasal dari Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2024, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,2387 (23,87%) berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2024. Nilai rata-rata (*mean*) senilai 0,0704 (7,04%) yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara masih berada dalam kategori pola instruktif (0-25%). Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara memiliki tingkat kemandirian keuangan yang masih tergolong rendah karena kemampuan yang dimiliki daerah tersebut masih terbatas terutama dalam membiayai keperluan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga

masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Standar deviasi sebesar 0,04579 (4,58%) menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat kemandirian keuangan antar pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara relatif rendah, sehingga kondisi kemandirian keuangan daerah cenderung merata selama periode penelitian.

Variabel independen X1 yaitu ukuran pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 27,8606 yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 29,3961 yang dihasilkan oleh Kota Ternate pada tahun 2023. Nilai rata-rata sebesar 28,4185 yang menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara memiliki ukuran aset yang relatif cukup besar dalam mendorong pelaksanaan pemerintah daerah, sedangkan standar deviasi sebesar 0,3859 yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata memperlihatkan bahwa pemerintah daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara cenderung homogen dan penyebaran ukuran pemerintah daerah relatif rendah sehingga tidak mempunyai perbedaan yang terlalu jauh. Kondisi ini menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya yang diterima masing-masing daerah berlaku secara merata selama periode penelitian.

Variabel independen X2 yaitu dana perimbangan yang memiliki nilai minimum sebesar 26,9317 yang dihasilkan oleh Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 28,2827 yang dihasilkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2023, sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 27,4273. Nilai rata-rata yang dimiliki cukup tinggi memperlihatkan bahwa dana perimbangan masih menjadi sumber penghasilan utama dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Standar deviasi sebesar 0,2983 lebih rendah dibanding nilai rata-rata menunjukkan bahwa adanya ketergantungan pada dana perimbangan yang terjadi secara menyeluruh di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.

Variabel independen X3 yaitu belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 24,6589 yang dihasilkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2024, sedangkan nilai maksimum sebesar 27,1133 yang dihasilkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2024 dengan nilai rata-rata sebesar 26,0411 yang memperlihatkan pengalokasian anggaran pemerintah daerah secara umum dengan

tujuan pembangunan aset tetap dan infrastruktur daerah untuk mendorong pelayanan publik. Standar deviasi senilai 0,5071 lebih kecil dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa variasi belanja modal antar pemerintah Kabupaten/Kota relatif rendah sehingga pola alokasi belanja modal antar daerah di Provinsi Maluku Utara cenderung tidak terlalu berbeda. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa pola pengeluaran pemerintah daerah dalam belanja modal relatif sama selama periode penelitian.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang menjadi dasar penggunaan modal regresi berganda agar mendapatkan hasil pengujian yang bersifat tidak biasa dan efisien. Sebelum dilakukannya uji regresi linear berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik mencakup Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

4.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual atau variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Menurut Ghozali (2021), data dapat dikatakan berkontribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$, sedangkan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berkontribusi normal. Normalitas data dapat diperkuat dengan grafik Normal P-P Plot, yaitu berarti data dapat dikatakan normal apabila titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2021). Hasil uji normalitas ditampilkan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03626331
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.047
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* bahwa penelitian ini memiliki data observasi sebanyak 50 data dengan nilai *Mean* sebesar 0,0000000 dan Standar Deviasi sebesar 0,03626. Nilai *Test Statistic* yang dihasilkan sebesar 0,083 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Kondisi ini menjelaskan bahwa residual pada model regresi terdistribusi dengan normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.1.2.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolineritas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Ghozali (2021), model dapat dinyatakan bebas dari multikolineritas apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil dari uji multikolineritas dipaparkan dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(X1) UPD	.569	1.756
	(X2) DP	.533	1.875
	(X3) BM	.796	1.256

a. Dependent Variable: (Y) Kinerja Keuangan

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.3 memperlihatkan hasil uji multikolinearitas bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* dan VIF yang telah memenuhi syarat bebas multikolinearitas. Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,569 dan VIF sebesar 1,756, variabel Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,533 dan VIF sebesar 1,875, serta variabel Belanja Modal (X3) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,796 dan VIF sebesar 1,256. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi sehingga asumsi multikolinearitas terpenuhi.

4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan antar varians dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik yaitu yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji *Glejser*. Menurut Ghazali (2021), model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ dan sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-.424	.263		-1.612
	(X1) UPD	.017	.010	.329	1.803
	(X2) DP	.006	.013	.089	.473
	(X3) BM	-.008	.006	-.195	-1.266
					Sig.

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.4 memperlihatkan hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji *Glejser* bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,078, variabel Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,638, serta variabel Belanja Modal (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,212. Hal tersebut berarti ketiga variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi heteroskedastisitas pada penelitian ini telah terpenuhi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.1.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antara residual pada suatu periode dengan periode sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson*. Menurut Ghozali (2021), menguraikan bahwa uji *Durbin-Watson* digunakan untuk mendeteksi autokorelasi tingkat pertama (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya konstanta (*intercept*) dalam bentuk model regresi dan tidak terdapat variabel lain di antara variabel independen. Hasil uji autokorelasi dipaparkan dalam Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.611 ^a	.373	.332	.0374271	2.095

a. Predictors: (Constant), (X3) BM, (X1) UPD, (X2) DP

b. Dependent Variable: (Y) Kinerja Keuangan

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji autokorelasi yang menggunakan *Durbin-Watson* untuk hipotesis sebesar 2,095 dengan jumlah data (n) sebanyak 50 dan jumlah variabel (k) sebanyak 3. Nilai D_L dan D_U yang dihasilkan dari tabel statistik *Durbin-Watson* yaitu D_L = 1,4206, D_U = 1,6739 dan 4 – D_U = 2,3261. Kriteria data dinyatakan lolos uji *Durbin-Watson* (DW) apabila $D_U < DW < 4 - D_U$. Berdasarkan hasil penelitian, memperoleh hasil $1,6739 < 2,095 < 2,3261$ sehingga hasil pada penelitian ini dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian, asumsi bebas autokorelasi telah dipenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.1.3 Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara parsial ataupun simultan terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah (Ghozali, 2021). Hasil analisis regresi linear berganda dipaparkan dalam Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4. 6 Analisis Linear Berganda

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-1.851	.504		-3.670
	(X1) UPD	.046	.018	.385	.016
	(X2) DP	.055	.025	.358	.030
	(X3) BM	-.034	.012	-.377	.006

a. Dependent Variable: (Y) Kinerja Keuangan

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.6 menunjukkan persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu sebagai berikut:

$$Y = -1,851 + 0,046X_1 + 0,055X_2 - 0,034X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kinerja Keuangan Pemerintah
-1,851	: Konstanta (α)
X ₁	: Ukuran Pemerintah Daerah
X ₂	: Dana Perimbangan
X ₃	: Belanja Modal
e	: <i>Error</i>

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (α)

Nilai konstanta α sebesar -1,851 yang memiliki arti apabila variabel ukuran pemerintah daerah (X₁), dana perimbangan (X₂), dan belanja modal (X₃) dianggap konstan atau bernilai nol, maka besarnya variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) adalah -1,851.

2. Ukuran Pemerintah Daerah (X₁)

Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 0,046 yang memiliki arti apabila ukuran pemerintah daerah meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,046 dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini memperlihatkan bahwa ukuran pemerintah daerah (X₁) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

3. Dana Perimbangan (X₂)

Koefisien regresi variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 0,055 yang memiliki arti apabila dana perimbangan meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,055 dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini memperlihatkan bahwa dana perimbangan (X₂) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

4. Belanja Modal (X₃)

Koefisien regresi variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka -0,034 yang memiliki arti apabila belanja modal naik satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan turun sebesar 0,034 dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini memperlihatkan bahwa belanja modal (X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menguraikan variabel dependen (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan *Adjusted R²* karena jumlah variabel independen yang dipakai lebih dari satu, sehingga lebih tepat digunakan dalam mengevaluasi model regresi berganda karena telah disesuaikan berdasarkan jumlah variabel dan ukuran sampel (Ghozali, 2021). Hasil dari uji koefisien determinasi dipaparkan dalam Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4. 7 Uji Adjusted R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.611 ^a	.373	.332	.0374271	2.095

a. Predictors: (Constant), (X3) BM, (X1) UPD, (X2) DP

b. Dependent Variable: (Y) Kinerja Keuangan

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dengan nilai R sebesar 0,611 yang berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai *R Square* sebesar 0,373 memperlihatkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah sebesar 37,3%, sedangkan sisanya sebesar 62,7% dideskripsikan oleh variabel lain di luar dari modal penelitian ini. Adapun nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,332 dimanfaatkan sebagai contoh utama karena dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen yang artinya ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah sebesar 33,2% secara bersama-sama.

4.1.5 Uji Hipotesis

Pengujaan hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial ataupun simultan. Tujuan analisis ini digunakan yaitu untuk menguraikan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen di dalam penelitian kuantitatif. Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima, dan sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2021).

4.1.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2021). Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian ini yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Nilai t tabel dalam penelitian ini adalah 2,013 dengan $df = 46$ dan $\alpha = 0,05$. Hasil dari uji t dipaparkan dalam Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4. 8 Uji Parsial (Uji T)

Model	t	Sig	Kesimpulan
X1 Ukuran Pemerintah Daerah	2.490	.016	H1: berpengaruh positif dan signifikan (Hipotesis diterima)
X2 Dana Perimbangan	2.241	.030	H2: berpengaruh positif dan signifikan (Hipotesis diterima)
X3 Belanja Modal	-2.883	.006	H3: berpengaruh negatif dan signifikan (Hipotesis diterima)

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji t atau uji parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel X1 Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 2,490 dengan nilai signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$. Nilai t hitung $2,490 > t$ tabel 2,013. Kondisi ini berarti ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, sehingga H1 diterima.

Variabel X2 Dana Perimbangan memiliki nilai t hitung sebesar 2,241 dengan nilai signifikansi sebesar $0,030 < 0,050$. Nilai t hitung $2,241 > t$ tabel 2,013. Kondisi ini berarti dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, sehingga H2 diterima.

Variabel X3 Belanja Modal memiliki nilai t hitung sebesar -2,883 dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$. Nilai t hitung $-2,883 > t$ tabel 2,013 secara absolut. Kondisi ini berarti belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, sehingga H3 diterima.

4.1.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Kriteria pengambilan keputusan pada uji simultan yaitu apabila nilai signifikansi $F < 0,05$ dan F hitung $> F$ tabel maka H4 diterima, dan sebaliknya jika nilai signifikansi $F > 0,05$ dan F hitung $< F$ tabel maka H4 ditolak. Nilai F tabel dalam penelitian ini yaitu 2,81 dengan $df1 = 3$ dan $df2 = 46$ pada $\alpha = 0,05$. Hasil dari uji F dipaparkan dalam Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4. 9 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.038	3	.013	9.117	.000 ^b
	Residual	.064	46	.001		
	Total	.103	49			

a. Dependent Variable: (Y) Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), (X3) BM, (X1) UPD, (X2) DP

Sumber: Output data diolah (SPSS 26), 2026

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji simultan (uji F) dengan nilai F hitung sebesar 9,117 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dikarenakan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah (X1),

dana perimbangan (X2), dan belanja modal (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, sehingga H4 diterima.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Maluku Utara dengan cara menguji berpengaruh atau tidaknya variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam periode waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020-2024. Berikut penjelasan yang lebih rinci:

4.2.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil uji t, variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,490 dengan nilai signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ yang berarti ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan H1 dalam penelitian ini diterima.

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu indikator yang memaparkan kapasitas sumber daya yang dihasilkan suatu daerah. Pada penelitian ini ukuran pemerintah daerah diukur melalui total aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Tingginya nilai aset yang dimiliki menggambarkan kapasitas sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pengembangan pendapatan daerah. Pemerintah daerah dengan nilai aset yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, sehingga mampu mengembangkan kinerja keuangannya.

Hasil penelitian ini searah dengan teori keagenan yang mendeskripsikan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat. Semakin besar sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, maka peluang pemerintah daerah untuk mengembangkan

kualitas pengelolaan keuangan juga semakin besar dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dengan aset daerah yang lebih besar cenderung mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam mendorong aktivitas operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi ini memungkinkan pemerintah daerah dalam pengoptimalan potensi ekonomi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Adinata dan Efendi (2022) yang mengemukakan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi ukuran pemerintah daerah, maka semakin tinggi juga kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki sehingga mampu mengembangkan kinerja keuangan daerah. Dengan itu, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Hasil uji t memaparkan bahwa variabel dana perimbangan menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,241 dengan nilai signifikansi sebesar $0,030 < 0,050$ yang berarti dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sehingga H2 dalam penelitian ini diterima.

Dana perimbangan adalah sumber pendanaan yang dimanfaatkan pemerintah daerah dalam pembiayaan bermacam aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dana tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal karena dapat membantu daerah dengan kapasitas fiskal terbatas dalam memenuhi keperluan pembiayaannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana perimbangan pemerintah daerah mampu mendorong terlaksananya kegiatan pembangunan, sehingga berpengaruh pada perkembangan kinerja keuangan daerah, serta menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara masih memerlukan bantuan transfer dari pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendorong pelaksanaan pembangunan.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa dengan meningkatkan dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini dapat terjadi karena mayoritas pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif rendah serta bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, adanya dana perimbangan menjadi sumber pendanaan yang sangat penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan dana yang diperoleh secara optimal upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana perimbangan secara efektif dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penelitian ini didukung oleh Maulina et al. (2021) yang dikatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana pemerintah pusat dapat mengembangkan kapasitas fiskal daerah sehingga bermacam program pembangunan oleh pemerintah daerah terlaksanakan secara lebih optimal.

Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, khususnya karena mayoritas daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.

4.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel belanja modal memiliki nilai t hitung sebesar -2,883 dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ yang berarti belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sehingga H3 dalam penelitian ini diterima. Arah hubungan negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi realisasi belanja modal, maka kinerja keuangan pemerintah daerah

yang diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan cenderung mengalami penurunan.

Penelitian ini menghasilkan bahwa kenaikan belanja modal diiringi dengan turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi dikarenakan belanja modal pada umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, gedung, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu selama periode penelitian berlangsung, peningkatan belanja modal belum mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD yang menjadi dasar pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah. Selain itu, sebagian besar belanja modal di pemerintah Provinsi Maluku Utara masih dibiayai oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, meskipun belanja modal meningkat, pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dan belum mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Kondisi ini mengakibatkan rasio kemandirian tetap rendah sehingga arah hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan menjadi negatif.

Belanja modal merupakan pembiayaan pemerintah daerah yang dimanfaatkan dalam memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal biasanya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana publik, serta investasi pemerintah daerah. Arah pengaruh negatif memaparkan bahwa adanya peningkatan belanja modal pada periode penelitian justru diiringi dengan turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, besarnya alokasi belanja modal juga dapat menaikkan keperluan pembiayaan pemerintah daerah. Apabila belanja modal yang dilaksanakan belum mampu memperoleh peningkatan pendapatan daerah secara optimal, maka hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan tingkat kinerja keuangan daerah.

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sebagian besar pengalokasian belanja modalnya masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Akibatnya, belanja modal yang meningkat belum tentu dapat meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah yang dimanfaatkan sebagai indikator kinerja keuangan dalam penelitian ini.

Menurut teori keagenan, pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran yang dipercayakan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian ini searah dengan penelitian Putri dan Yuniarti (2023) mengemukakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas belanja modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pengalokasian anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 9,117 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan dengan demikian H4 diterima.

Hasil pengujian menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi dapat dipengaruhi secara simultan oleh ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama-sama serta kebijakan alokasi belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif kepada masyarakat. Selama pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah daerah membutuhkan dorongan sumber daya berupa sumber anggaran yang memadai, aset daerah, dan kebijakan anggaran yang tepat agar dapat memperoleh kinerja keuangan yang lebih baik.

Ukuran pemerintah daerah menggambarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dana perimbangan adalah sumber anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat upaya mendorong pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan belanja modal adalah bentuk pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan aset dan infrastruktur

yang menunjang pelayanan publik. Ketiga variabel tersebut saling berhubungan dalam menentukan tingkat kesuksesan pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan tugas indikator tersebut secara simultan akan berpengaruh pada tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian tersebut searah dengan penelitian Maulina et al. (2021) yang menjelaskan bahwa ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ardelia et al. (2022) yang mengatakan bahwa faktor kapasitas daerah, transfer pemerintah pusat, serta pembiayaan daerah secara simultan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa secara simultan ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Hal ini berarti semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Besarnya nilai aset yang dimiliki daerah dapat mendorong terlaksananya pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Hal ini berarti dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran yang penting dalam mendorong pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik sehingga dapat mengembangkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Hal ini berarti meningkatnya belanja modal selama periode penelitian belum dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara langsung. Kondisi ini disebabkan karena belanja modal merupakan investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan aset tetap yang manfaat ekonominya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang atau periode berikutnya. Selain itu, meningkatnya belanja modal belum diiringi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah masih berada pada tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat, serta menyebabkan peningkatan belanja modal cenderung diiringi dengan

penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah dan menghasilkan hubungan yang negatif.

4. Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya daerah, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, dan juga kebijakan pengalokasian belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat terus mengembangkan efektivitas pengelolaan belanja modal sehingga dapat menghasilkan manfaat yang semakin mendukung perkembangan kinerja keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan upaya penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meminimalisir ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengombinasikan variabel lain yang diduga dapat memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, mengingat kemampuan ketiga variabel dalam penelitian ini hanya mampu mendeskripsikan kinerja keuangan sebesar 33,2%, sedangkan sisanya masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Noviyanti, N., Jurusan Akuntansi, K., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2016). Accounting Analysis Journal Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. In *Aaj* (Vol. 5, Number 1). [Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj)
- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintahan Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Afifah, S. I., & Adnan, A. (2022). Pengaruh Varian Anggaran, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kapasitas Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 485–498. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21670>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah Dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Statistik Indonesia 2026*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Realisasi Anggaran Dan Neraca) Tahun 2020-2024*.
- Ernawati, Dirgantari, N., Pramono, H., & Wibowo, H. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021. *Jurnal Ek&Bi*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamsiah, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Azkiya Publishing.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also Published In Foundations Of Organizational Strategy. In *Journal Of Financial Economics* (Number 4). Harvard University Press.
[Http://Ssrn.Com/Abstract=94043](http://Ssrn.Com/Abstract=94043)Electroniccopyavailableat:[Http://Ssrn.Com/Abstract=94043](http://Ssrn.Com/Abstract=94043)<http://Hupress.Harvard.Edu/Catalog/JENTHF.Html>
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. (2026). *Jumlah Pulau Di Indonesia*.
- Khoiriyyah, M. Z., & Aliyah, S. (2025). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 22(2).
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5(2), 390.
[Https://Doi.Org/10.52362/Jisamar.V5i2.373](https://doi.org/10.52362/Jisamar.V5i2.373)
- Niswani, N., Ikhyannuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (Jam)*, 1(1), 64. [Https://Doi.Org/10.29103/Jam.V1i1.6367](https://doi.org/10.29103/Jam.V1i1.6367)
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088.
[Https://Doi.Org/10.47065/Ekuitas.V4i3.2745](https://doi.org/10.47065/Ekuitas.V4i3.2745)
- Pratama, D. P., Grania Mustika, I., Karpriana, A. P., & Akuntansi, P. S. (2024). Ciptaan Disebarluaskan Di Bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 8(4), 720–732. [Https://Doi.Org/10.52362/Jisamar.V8i4.1609](https://doi.org/10.52362/Jisamar.V8i4.1609)
- Putri, N. P. A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01).
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8).

- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sibua, N., & Pribadi, F. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011- 2015). *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 02(03).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sutopo, Ed.). ALFABETA.
- Suwarno, Huda, S., & Fitriyah, Z. (2017). *Kemandirian Keuangan Daerah*. Mitra Sumber Rejeki.
- Wijayanti, H., & Fuad, K. (2025). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Melalui Rasio Keuangan: Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5). <https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id>